

**ANALISIS PENCATATAN DAN PENYAJIAN BELANJA MODAL PADA KANTOR REGIONAL XI
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MANADO****RECORDING AND REPORTING ANALYSIS OF CAPITAL EXPENDITURE IN THE XI REGIONAL
OFFICE NATIONAL CIVIL SERVICE AGENCY IN MANADO**

Oleh:

**¹Rumondang Agus Melati Simbolon
²Novi Budiarmo**^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam RatulangiEmail : ¹mondangsimbolon5@gmail.com
²novi_sbudiarmo@yahoo.com

Abstrak: Dalam rangka mewujudkan *good governance* yang salah satu diantaranya akuntabilitas maka diperlukan adanya suatu tindakan tata kelola pemerintahan yang baik, karena masyarakat juga menuntut adanya transparansi dan keterbukaan pemerintah dalam mengelola APBD. APBD merupakan agenda strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini juga tiap Daerah belum berhasil mengefektifkan APBD secara tepat. Penelitian ini dilakukan di Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara (BKN) Manado dan hanya membahas belanja modal. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimanakah Kantor Regional XI BKN Manado dalam melakukan pencatatan dan penyajian belanja modal dengan baik atau tidak (sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Regional XI BKN Manado telah melaksanakan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 serta Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah yang disertai dengan penyajian akumulasi penyusutan dalam pelaporannya.

Kata kunci: *analisis, pencatatan, penyajian, belanja modal*

Abstract : *In order to realize good governance , one of them the accountability of the necessary existence of an act of good governance, because the public also demands for transparency and openness of government in managing the budget. Budgets are a strategic agenda to improve the welfare of society. In this case as well as each area is not managed properly operating the regional budget. This research was conducted at the Civil Service Agency in Manadond only discusses capital expenditure. The purpose of this research is how the XI Regional office National Civil Service Agency in Manado recording and presentation of capital expenditure spending well or not (in accordance with PP No 71/2010 and Permendagri No 64/2013). The methods used is descriptive method. Using secondary data sources. Results from the study showed National Civil Service Agency has implemented financial management in accordance with PP No.71/2010 concerning Government Accounting Standards and Regulation No. 64/2013 on Regional Financial Management and presentation of accumulated depreciation contained in its reporting.*

Keywords: *analysis, record, presentation, capital expenditure*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia di tengah dinamika perkembangan global maupun nasional, saat ini menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. *Good governance* atau tata pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai, terutama pasca krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan reformasi.

Keinginan untuk mewujudkan *good governance* merupakan salah satu agenda pokok reformasi yang diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah. Masyarakat menuntut adanya akuntabilitas yang baik disertai transparansi dan keterbukaan pengelolaan sektor publik supaya masyarakat dapat turut serta dalam mengontrol dan memperbaiki kinerja pemerintah daerah.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dibutuhkan adanya satu jaminan bahwa segala aktivitas dan transaksi pemerintah terekam secara baik dengan ukuran- ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan, sehingga bisa dilihat segala yang terjadi dan yang terdapat dalam ruang entitas pemerintahan tersebut.

Watusoke, (2014:74) menyatakan aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset tetap daerah seperti tanah dan bangunan merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya serta dapat menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado merupakan salah satu pusat biaya yang ada di pemerintahan daerah yang telah dianggarkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sebagai organisasi sektor publik yang bergerak dalam hal manajemen pegawai, Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado juga menerapkan mekanisme pencatatan dan pengelolaan keuangan yang termasuk didalamnya membahas tentang anggaran. Pengendalian laporan keuangan sangatlah penting dilakukan oleh setiap Dinas di Kota Manado agar supaya setiap anggaran yang ditetapkan untuk membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, bagaimana pencatatan dan penyajian belanja modal pada Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Pontoh, (2013:8) menyatakan akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang dirancang oleh sebuah organisasi untuk mengidentifikasi (analisis, mencatat, dan meringkas) aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi kondisi dan kinerja keuangannya, kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan, baik dari internal maupun eksternal organisasi. Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian di antaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya (Riahi-Belkaoui, 2011:50). Dapat disimpulkan akuntansi adalah suatu sistem informasi yang membuat dan memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Indonesia

Sujarweni, (2015:40) menyatakan ruang lingkup sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia adalah pemerintah pusat (dalam hal ini adalah lembaga tinggi Negara dan lembaga eksekutif) serta pemerintah daerah yang mendapat dana dari APBN (terkait dengan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan). Oleh karena itu, sistem akuntansi pemerintah Indonesia tidak dapat diterapkan untuk lingkungan pemerintah daerah (yang

menggunakan APBD), lembaga keuangan Negara, serta BUMN/BUMD. Sistem akuntansi pemerintahan Indonesia berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 pasal 1 merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Dengan demikian sistem akuntansi pemerintah adalah sistem pencatatan yang dapat menghasilkan informasi keuangan untuk tujuan intern pemerintah bahkan untuk tujuan luar organisasi.

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Seiring dengan disahkannya Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, definisi Keuangan Negara yang saat ini digunakan harus mengacu kepada peraturan perundangan tersebut. Menurut pasal 1 ayat 1 keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dasar Hukum Keuangan Negara/Daerah

Dasar hukum pengelolaan keuangan Negara:

1. Amandemen UUD 1945 Bab VIII pasal 23
2. Undang-undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dasar hukum pengelolaan Keuangan Daerah:

1. UU No.32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah.

Arti dan Tujuan Pengelolaan Keuangan Negara

Pramono, (2010:33) menyatakan pengelolaan keuangan Negara adalah manajemen keuangan Negara, atau administrasi keuangan Negara. Tujuan pengelolaan keuangan Negara adalah agar daya tahan dan daya saing perekonomian nasional semakin dapat ditingkatkan dengan baik dalam kegiatan ekonomi yang semakin bersifat global, sehingga kualitas kehidupan masyarakat dapat meningkat sesuai dengan yang diharapkan.

Azas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Mursyidi, (2010:40) menyatakan dalam rangka pengelolaan keuangan Negara dikenal adanya beberapa azas yang sudah lazim digunakan selama ini yaitu azas tahunan, universalitas, spesialisitas, dan kesatuan. Pengelolaan keuangan Negara/Daerah juga mengadopsi azas-azas yang telah diterapkan diberbagai Negara untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan Negara/Daerah secara akuntabel dan transparan. Azas-azas yang dimaksud sebagai berikut:

1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil
2. Profesionalitas
3. Proporsionalitas
4. Keterbukaan, dan
5. Pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PP No.17 Tahun 2003 Bab III APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan Negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan Negara. Penyusunan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

APBN terdiri sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan, terdiri atas
 - a. Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.
 - b. Dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus.
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana Hibah, atau dana Darurat.

2. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.
3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Widodo, (2014:78) menyatakan dalam struktur pemerintah daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan kerja tersebut. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No.64 Tahun 2013 (pasal 24 sampai dengan pasal 258) mengatur prosedur akuntansi penerimaan kas, dan aset pada SKPD yang meliputi serangkaian proses mulai pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas, pengeluaran kas, dan atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan aplikasi komputer.

Secara umum sistem akuntansi pada SKPD dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Akuntansi Pendapatan
Dalam PP No. 71 Tahun 2010, menyatakan akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya. Untuk mencatat pendapatan dalam buku jurnal setelah menerima dokumen sumber dari bendahara penerimaan berupa SPJ penerimaan dan lampirannya.
2. Akuntansi Belanja
Dalam PP No. 71 Tahun 2010, akuntansi belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Akuntansi belanja pada SKPD meliputi Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), dan Langsung (LS).
3. Akuntansi Aset Tetap
Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD. Aset tetap sesuai dengan karakteristiknya Permendagri No. 17 Tahun 2007 menyebutkan secara spesifik pengertian dari aset tetap, namun secara umum hampir semua nomenklatur aset diberi barang milik daerah dengan defenisi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah Yusuf (2009:57).

Penelitian Terdahulu

Syefira (2013) dalam penelitiannya mengenai: Analisis Penyajian dan Pelaporan Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Kota Manado. Hasil dari penelitian ini adalah Di dalam Dinas Perhubungan Kota Manado telah melaksanakan pengelolaan keuangan dan sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2003. Persamaan penelitian ini, Peneliti sebelumnya melakukan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dan perbedaannya yaitu Peneliti sebelumnya melakukan penelitian dengan objek pada Dinas Perhubungan Kota Manado sedangkan peneliti melakukan penelitian pada Kantor Regional XI BKN Manado, juga perbedaannya yaitu tidak mengacu pada Permendagri No.13 Tahun 2003.

Lestari (2013) dalam penelitiannya mengenai: Penerapan Akuntansi Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Kota Bitung. Hasil penelitian ini adalah Dalam Dinas Perhubungan Kota Bitung telah menerapkan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010. Persamaan dengan penelitian ini, Peneliti sebelumnya menguraikan secara rinci tentang belanja modal, dan perbedaannya yaitu Peneliti sebelumnya masih menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis kas menuju akrual sedangkan peneliti menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sugiyono, (2011:13) menyatakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan apa yang terjadi dilapangan kemudian dianalisis atau diklasifikasikan.

Tempat dan waktu penelitan

Pemilihan lokasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pada Kantor Regional XI BKN Manado, yang beralamat Jl. AA Maramis, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara. Dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari 2016.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian pada Kantor Regional XI BKN Manado adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Judul dan Merumuskan Masalah
2. Mengumpulkan data Pustaka
3. Pengumpulan Data Melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi pada Kanreg XI BKN Manado
4. Mengolah Data
5. Kesimpulan dan Saran

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Sugiyono, (2011:23) menyatakan data kualitatif adalah data yang tidak dinyatakan dalam bentuk numerik tetapi berupa gambaran deskriptif/dalam bentuk uraian seperti gambaran umum perusahaan, kegiatan operasioanal perusahaan dan data kepustakaan. Data kuantitatif adalah Data yang dinyatakan dalam bentuk numerik atau angka seperti data laporan keuangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif fan kuantitatif. Data kualitatif berupa profil Kantor Regional XI BKN Manado, uraian tugas (*job description*), data kepustakaan. Dan data kuantitatif adalah laporan keuangan Kantor Regional XI BKN Manado periode 2013-2014.

Sumber Data

Sugiyono, (2011:45) menyatakan data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perusahaan sebagai objek penelitian yang sudah diolah dan terdokumentasi di dalam perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa struktur organisasi, uraian tugas, laporan keuangan periode 2013-2014 pada Kantor Regional XI BKN Manado. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan berupa Peraturan pemerintah yang menyangkut dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk menggunakan kesimpulan yang lebih luas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum

Ramping struktur kaya fungsi, mungkin itulah kata-kata yang tepat untuk mencerminkan kondisi Kantor Regional XI BKN Manado. Kantor yang telah berdiri selama 9 tahun ini dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 14 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 dan secara operasional melaksanakan tugas dan fungsinya mulai bulan Januari 2007. Kantor Regional XI BKN, dibentuk untuk mengakomodir kebutuhan pelayanan manajemen kepegawaian di tiga (3) provinsi yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara. Dan saat ini Kanreg XI BKN Manado di bawah pimpinan Bapak English Nainggolan, SH, MH

Visi dan Misi Kanreg XI BKN Manado

Visi

Menjadi penyelenggara manajemen dan pelayanan kepegawaian yang profesional dan bermartabat di tahun 2025.

Misi

1. Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian Negara.
2. Mengembangkan sistem pelayanan kepegawaian Negara.
3. Mengembangkan sistem manajemen internal BKN.

Hasil Penelitian

Pencatatan Belanja Modal

Pada Kantor Regional XI N BKN Manado pembiayaan untuk kegiatan disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta subsidi/ bantuan dari Pemerintah Pusat dan sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku demikian halnya untuk memperoleh aset tetap dalam belanja modal. Jadi segala sesuatu yang diperoleh dari anggaran Pemerintahan Pusat dan sumber-sumber lain yang sah merupakan Barang Milik Negara.

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa pencatatan aset tetap di lembar muka neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pencatatan Aset Tetap di Lembar Muka Neraca

Nama akun	Jumlah
Aset Tetap	
Tanah	xxx
Peralatan dan Mesin	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx
Aset Tetap lainnya	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx
Total Aset Tetap	xxx

Sumber : PP No 71 Tahun 2010

Tabel 2. Neraca Tingkat Satuan Kerja

Aset Tetap	C.2	Anggaran	Terealisasi
Tanah	C.2.1	6.579.250.000	6,579,250,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	12.951.653.444	10.508.092.475
Gedung dan Bangunan	C.2.3	31.258.655.021	30,309,183,071
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	1.966.130.500	1,758,908,000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	64.017.695	54.177.570
Akumulasi Penyusutan	C.2.7	(10.839.939.729)	(8.016.418.716)
Jumlah Aset Tetap		41.979.766.931	41.193.192.400

Sumber : Laporan Keuangan Kanreg XI BKN Manado.

Tabel 2 menunjukkan bahwa pencatatan yang dilakukan oleh Kantor Regional XI BKN Manado telah sesuai dengan pencatatan yang dituliskan dalam PP No.71 Tahun 2010, yaitu adanya akumulasi penyusutan dan kontruksi dalam pengerjaan yang merupakan aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Penyajian Belanja Modal

Penyajian belanja modal pada Kantor Regional XI BKN Manado dalam pembahasannya terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang telah disusun sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 dan sesuai juga dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 dan dilaporkan sebagai pertanggungjawaban pada bidang yang bertanggungjawab dalam laporan keuangan. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Tabel 3. Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Des 2013 dan 31 Des 2014 Kantor Regional XI BKN Manado

Uraian	Catatan	31 DES 2014			301 DES 2013
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN					
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	44.375.731	0	5.613.695
Jumlah Pendapatan		0	44.375.731	0	5.613.695
BELANJA					
1	Belanja Pegawai	3.465.897.000	3.080.795.095	88.89	2.555.583.745
2	Belanja Barang	4.252.646.000	3.858.647.339	90.74	3.763.037.805
3	Belanja Modal	3.851.648.000	3.646.614.291	94.68	9.945.229.675
Jumlah Belanja		11.570.191.000	10.586.056.725	91.49	16.263.851.225

Sumber: Kanreg XI BKN SULUT 2013-2014.

Tabel 3 menunjukkan realisasi belanja tahun 2014 adalah sebesar Rp 10.586.056.725 atau sebesar 91,49%. Realisasi tersebut ditetapkan setelah Perda Perubahan APBD sebesar Rp 11.570.191.000. Didalamnya dapat dilihat Anggaran Belanja Modal adalah sebesar Rp 3,851,648,000 dan terealisasi sebesar Rp 3.646.614.291 sebesar 94,68% maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran yang telah dipakai sudah mendekati pemakaian sepenuhnya untuk merealisasikan dalam belanja modal.

Pembahasan

Hasil penelitian diketahui bahwa pencatatan dan penyajian belanja modal telah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 dan sesuai dengan Permendagri No.64 Tahun 2013. Dalam hal ini pengakuan belanja modal pada Kantor Regional XI BKN Manado mengakui belanja pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah. Aset yang diperoleh oleh dari belanja modal menurut SAP No.2 dicatat sebesar biaya perolehan, serta dalam menyampaikan laporan keuangan pertanggungjawaban sama halnya dengan PP No.71 Tahun 2010 yang mengakui belanja jika nilai yang disajikan dalam Neraca menggambarkan nilai perolehan sampa sekarang termasuk dengan tambahan belanja modal tahun-tahun terakhir serta dalam Permendagri No.64 Tahun 2013 mengakui belanja pada saat terjadi pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit perbendaharaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Kantor Regional XI BKN telah menggunakan sistem komputerisasi dalam hal mencatat laporan keuangan sehingga memudahkan dalam proses pencatatan dan penyajiannya.
2. Pencatatan dan Penyajian atas Belanja Modal pada Kantor Regional XI BKN telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan juga sesuai dengan Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.

Saran

Saran yang peneliti berikan yaitu kepada Kantor Regional XI BKN Manado, kiranya untuk tahun-tahun berikutnya, hendaknya Kantor Regional XI BKN Manado berpedoman sepenuhnya kepada Peraturan Pemerintah yang berlaku serta yang ditetapkan oleh Pemerintah, agar Pengelolaan Keuangan dapat berwujud dengan efektif dan efisien serta dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lestari, Rima, 2013. Penerapan Akuntansi Belanja Modal pada Dinas Perhubungan Kota Bitung. *Jurnal EMBA* ISSN 2303-1174. <http://ejournal.unsra.ac.id/index.php/emba/article/view/4868/4394>
Diakses 23 Maret 2016. Hal. 22-31.
- Langelo, Friska. 2015. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah di Kota Bitung. *Jurnal EMBA* Vol.3 No.1 <http://ejournal.unsra.ac.id/index.php/emba/article/view/6556/6080>. Diakses 8 April 2016. Hal. 1-8.
- Mursyidi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta.
- Pramono, Hariadi. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba, Jakarta.
- Pontoh, Winston. 2013. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka, Jakarta Barat.
- Riahi-Belkaoui. 2011. *Accounting Theory*. Edisi 5. Salemba Empat, Jakarta.
- Sujarweni, Wiratna, 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Syefira, Anisa. 2013. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal Pada Dinas Perhubungan Kota Manado. *Jurnal EMBA*. <http://ejournal.unsra.ac.id/index.php/emba/article/view/4422/3950>. Diakses 23 Maret 2016. Hal. 21-34.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. IKAPI, Bandung.
- Watusoke Y.S. 2014. Analisis Belanja Modal dan Pelaporannya pada Dinas Kesehatan Kota Manado. *Jurnal EMBA* Vol 2 No. 04 Desember 2014 ISSN 2303-1174. <http://ejournal.unsra.ac.id/index.php/emba/article/view/6219/5745>. Diakses 23 Maret 2016. Hal. 23-38.
- Widodo, Teguh. 2014. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta.